1st E-proceeding SENRIABDI 2021
Seminar Nasional Hasil Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Sahid Surakarta Vol. 1 No. 1 Desember 2021 Hal. 390-399

Kelembagaan Pengelolaan Wisata Alam di Desa Labuhan, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan

Prafa Rasmahanum Ara[1], Anita Kristina[2]

[1,2]Universitas Trunojoyo Madura
e-mail: [1]prafara.rasmahanum@gmail.com, [2]anita_amanda_ali@yahoo.com

Abstrak

Adanya permasalahan pengelolaan sektor pariwisata yang belum memadai dalam perspektif kelembagaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kelembagaan pengelolaan wisata alam di Desa Labuhan, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif studi kasus. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil dalam penelitian ini berkaitan dengan tata kelola kelembagaan yang melibatkan beberapa aktor. Kesimpulan hasil dalam penelitian ini menemukan bahwa dalam peran aktor mengelola pariwisata masih terdapat kecemburuan sosial antara pokdarwis dengan masyarakat lokal. Jalinan hubungan antar pokdarwis individu satu dengan yang lainnya dalam pengelolaan memiliki nilai kebersamaan yang baik dengan diberlakukannya aturan/kebijakan yang disepakati bersama. Dan terdapat hubungan jejaring kerjasama dengan pemerintah yang diwakilkan oleh aparatur desa dan swasta yaitu Pertamina, tidak hanya itu kelompok masyarakat lokal yaitu Kartar memberikan kontribusi apabila sewaktu-waktu diperlukan.
Kata Kunci: kelembagaan, modal sosial, wisata alam berbasis masyarakat

Abstract

The existence of the problem on management tourism sector who has not adequate from an institutional perspective. This study aims to identify and analyze the institutional management of natural tourism in Labuhan Village, Sepulu District, Bangkalan Regency. This research was conducted using a qualitative approach with a case study research method. It uses data collection techniques in the form of observation, in-depth interviews, and documentation. The result of this research is related to institutional governance involving of various actors. In conclusion, it was found that there is social jealousy towards tourism management actors, in this case between tourism awareness groups (pokdarwis) by the local community around them. However, it is known that the relationship between individual Pokdarwis (Tourism Awareness Group) among them in management has a good value of togetherness with the implementation of mutually agreed rules/policies. There is also a network relationship in the form of cooperation with the government, represented by village officials and the private sector, namely Pertamina, not only that, the local community group also known as youth organization or karang taruna has been provided significant contributions any time if necessary.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Keywords: *institutional, mechanism of management, natural tourism based on community*

Pendahuluan

Sektor pariwisata sering dikaitkan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dimana tidak hanya berfokuskan pada kontribusi penyumbang pendapatan baik negara maupun daerah, melainkan juga bentuk dari melestarikan lingkungan alam. Di Indonesia, banyak pesona alam melimpah. Hal ini menjadi peluang dimanfaatkannya sebagai wisata alam.

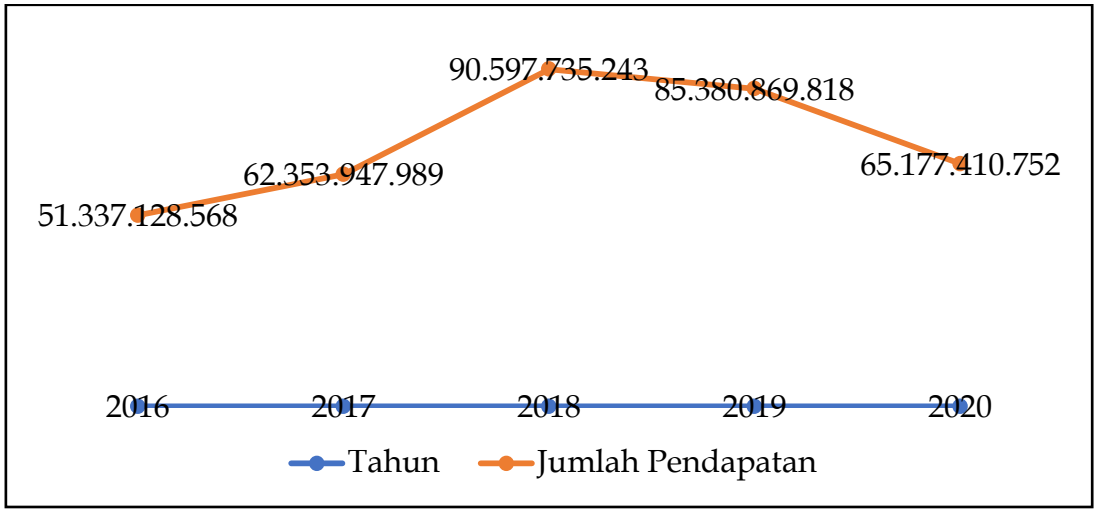

Gambar.1 Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan dari Sektor Pariwisata.
Sumber: Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2020

Membuktikan bahwasannya pariwisata memiliki kontribusi positif dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Matthoriq et al., 2021). Pariwisata dipandang sebagai solusi dalam menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Hal ini membuat masyarakat akan merasakan dampak secara langsung dengan adanya pendapatan tambahan melalui pariwisata. Dikarenakan, pariwisata tak luput dari partisipasi masyarakat (Dodds et al., 2018). Peran masyarakat diatur pada UU RI Nomor 10 Tahun 2009 yang memiliki hak menjadi pekerja, berjualan, hingga menjadi pengelola secara langsung di pariwisata. Di pariwisata sendiri terdapat sekelompok masyarakat yang diberi nama Kelompok Sadar Pariwisata (Pokdarwis). Pokdarwis diberikan amanah dalam bertanggungjawab atas pembangunan pariwisata yang berusaha untuk memberikan daya tarik dalam pengelolaan pariwisata yang mengatur strategi-strategi berkembangnya pariwisata dengan tujuan, visi dan misi bersama.

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata secara langsung. Sering kali terjadi permasalahan-permasalahan yang timbul dikarenakan pengelolaannya, seperti aturan/kebijakan yang tumpang tindih baik dari pemerintah maupun pengelola itu sendiri, sumber daya manusia yang belum memiliki keahlian khusus dalam mengelola pariwisata, publikasi yang kurang, infrastruktur yang belum memadai, hingga kurangnya perhatian akan lingkungan yang seharusnya dijaga (Nugroho, 2020). Pariwisata memberikan lapangan

pekerjaan bagi masyarakat, namun dapat menjadi permasalahan apabila pendapatan tiap individu memiliki perbedaan dikarenakan ruang kekuasaan yang apabila tidak ada peleraian masalah ini akan semakin kompleks (Eddyono, 2021). UU RI Nomor 10 Tahun 2009 menyebutkan bahwa dalam mengatur pariwisata membutuhkan kelembagaan dalam jejaringan yang terorganisir seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Apabila dalam pengelolaan dan pemberdayaan pariwisata masyarakatnya belum memahami, maka akan berdampak lebih parah dalam kesenjangan sosial di pariwisata. Kelembagaan atas modal sosial antar *aktor* dalam pengelolaan wisata memiliki kurangnya kepercayaan yang membuat konflik antar *aktor.* Hal ini membuat jalannya pengelolaan menjadi terhambat dikarenakan tidak diiringi oleh kepercayaan. Sedangkan kepercayaan itu sangat penting, dikarenakan merupakan dasar pondasi sebuah kelompok untuk menjalin kelancaran tujuan yang ingin dicapai.

Pengelolaan wisata alam ini dipahami dengan konteks teori-teori kelembagaan. Keberhasilan pariwisata dapat berjalan dengan lancar yakni kelembagaan (Asmoro & Da'awi, 2020), maka dalam hal ini membutuhkan peran aktor dalam menata kelola pariwisata untuk menunjang keberhasilan pengelolaan dengan membuat strategi-strategi pembangunan pariwisata (Matthoriq et al., 2021). Pengaruh besar yang berasal dari modal sosial akan memberikan dampak pada kualitas manusia, antara lain seperti kemampuan menyelesaikan permasalahan bersama, mendorong perubahan situasi yang cepat di lingkungan masyarakat, menumbuhkan kesadaran kolektif dan mencari peluang meningkatkan kesejahteraan bersama (Muntasib & dkk, 2017). Hal ini yang berarti modal sosial memiliki ikatan hubungan antara individu satu dengan individu lain yang bergabung di sebuah organisasi atau kelompok. Modal sosial menurut Fathy (2019) memiliki elemen inti yakni norma, jaringan dan kepercayaan. Norma diberlakukan untuk membentuk sikap dan perilaku positif dalam pengelolaan pariwisata dimana mengatasi kepentingan kelompok diatas kepentingan tiap individu (Muntasib & dkk, 2017). Jaringan sosial membentuk relasi-relasi sosial yang membuat informasi dapat tersampaikan dengan cepat (Coleman, 2021). Dan dengan membangun kepercayaan pada sebuah kelompok, maka akan timbul perilaku normal tanpa harus menutup-nutupi sesuatu hal yang tidak boleh diketahui antara aktor satu dengan yang lainnya, perilaku dan perkataan jujur akan membuat sifat saling percaya akan semakin menjadi hal yang mendasar pada diri seseorang, dan menimbulkan kooperatif dengan berdasarkan norma-norma yang dimiliki.

Pariwisata pasti memiliki mekanisme pengelolaan dalam menerapkan program atau kegiatan yang dimiliki dengan tidak terlepas dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi (Daraba, 2017). Proses program atau kegiatan yang ingin dicapai membutuhkan jangka waktu yang lama, hal ini dikarenakan didasari pada masyarakat yang harus memiliki nilai dedikasi, konsistensi, sistematis dan terorganisir (Rhama, 2020). Pokdarwis memiliki peran penting dalam mekanisme pengelolaan dimana anggota-anggota pokdarwis merupakan masyarakat lokal yang berumur dewasa hingga remaja, hal ini dilakukan akan mendapatkan kesepakatan bersama terhadap program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mendapatkan ide-ide inovatif dan kreatif dalam pengembangan daya tarik wisata (Suprapto et al.,

2021). Melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata sangat dibutuhkan, namun dalam hal ini juga harus memiliki kesadaran diri masing-masing dalam berpartisipasi mengembangkan pariwisata (Dewi & Hermawan, 2017). Sebenarnya apabila masyarakat selalu terlibat pengelolaan pengembangan pariwisata mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Secara tidak sadar masyarakat merasa bahwasannya perannya sangat dibutuhkan dalam pengelolaan pariwisata (Hermawan & Hutagalung, 2019)(Alandera, 2018). Mekanisme pengelolaan membutuhkan aktor-aktor lain yang mendukung seperti penelitian yang pernah dilakukan oleh Gustina (2018) membuktikan bahwa pokdarwis tidak dapat bekerja sendiri melainkan harus dibantu oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, dan masyarakat yang bukan merupakan anggota pokdarwis.

Pengembangan wisata alam yang berbasis komunitas memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata baik secara langsung maupun tidak langsung dengan melakukan kontrol baik dari segi merencanakan hingga pengawasan, terlibat dalam manajemen tatanan kelola dan mekanisme, dan pengembangan pariwisata (Amerta & dkk, 2018). Adanya pariwisata yang melibatkan langsung masyarakat lokal akan memberikan peluang seperti kesempatan masyarakat untuk menjadi pelaku ekonomi di wisata tersebut, hal ini juga akan meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat, masyarakat lokal semakin terampil dalam menunjang keberhasilan pengembangan pariwisata, dan menekan kebocoran pendapatan dimana masyarakat yang bukan daerah desa tersebut tidak dapat berpartisipasi di pariwisata (Eddyono, 2021). Peran kelembagaan dalam tata kelola sebuah kelompok akan membuat pengelolaan wisata alam berbasis komunitas dapat terkontrol dengan mobilitas yang ada demi tujuan bersama.

Penelitian ini berperspektif teori kelembagaan berfokus pada modal sosial. Fokus dalam penelitian ini pada nilai kepercayaan, nilai kebersamaan, dan jejaring kerja yang ada di Wisata Alam Desa Labuhan, dikarenakan adanya ciri-ciri modal sosial atau dapat dikatakan terdapat hubungan kelembagaan yang terjalin. Kemudian, penelitian ini juga mendeskripsikan interaksi tiap-tiap pemangku kepentingan agar dapat lebih detail mengetahui kelembagaan yang berperan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kelembagaan pengelolaan wisata alam di Desa Labuhan, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan. Atas persoalan-persoalan ini akan memberikan manfaat teoritis yaitu menambah wawasan mengenai ilmu ekonomi kelembagaan. Dan manfaat secara praktis yaitu untuk memberikan bahan referensi terkait kebijakan bagi pemerintah dan pokdarwis.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Penyelidikan dalam studi kasus ini dilakukan di Wisata Alam Desa Labuhan, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam dengan cara tidak terstruktur, dan dokumentasi. Analisis data dengan cara mendeskripsikan atas temuan yang ditemukan, berfokus pada persoalan

kelembagaan pengelolaan yang ada di pariwisata, kemudian dianalisis secara induktif. Informan penelitian ini adalah ketua pokdarwis sebagai perwakilan dari pengelola wisata alam di Desa Labuhan dan aparatur desa. Analisis data didiskusikan dengan konsep teori-teori ekonomi kelembagaan. Uji keabsahan data dilakukan melalui uji triangulasi data. Kemudian uji kredibilitas melalui hasil dengan konsep teori-teori ekonomi kelembagaan.

Hasil dan Pembahasan

Temuan atas kelembagaan pengelolaan di wisata alam dideskripsikan berdasarkan temuan sebagai berikut:

Nilai Kepercayaan Dalam Pengelolaan Wisata Alam

Pengelolaan Wisata Alam di Desa Labuhan, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan terdapat organisasi/kelompok/forum, yakni Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Pokdarwis memiliki peran penting dalam bertanggung jawab atas pembangunan wisata, yang berarti pokdarwis memegang secara langsung dalam pengelolaan wisata. Pokdarwis akan berjalan lancar sesuai tujuan dengan catatan harus memiliki kepercayaan antar aktor.

"Fasilitas-fasilitas ini dari Pertamina dan dana desa."

Menyebutkan bahwa terdapat fasilitas-fasilitas yang ada di Wisata Alam Desa Labuhan menyebutkan berasal dari Pertamina dan aparatur desa sebagai perwakilan dari pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini yang berarti Pertamina dan aparatur desa memiliki kepercayaan atas pengelolaan yang dilakukan oleh pokdarwis.

> *"Saya tidak pernah mengajukan dana kepada Pertamina dan pihak kabupaten tidak pernah mengajukan berupa uang. Yang artinya saya meminta uang berupa fisik. Karena bagi saya pribadi masalah uang adalah masalah sensitif. Nanti malah dikira uangnya dipakai pribadi. Kalau berupa fisik kan ya sudah selesai aman."*

Namun, di lain sisi terdapat kepercayaan dari Pertamina dan aparatur desa. Tetap memiliki ketidakpercayaan yang berasal dari masyarakatnya sendiri. Hal ini dibuktikan dengan inisiatif ketua pokdarwis yang ketika mengajukan keperluan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk perkembangan pariwisata dengan berupa fisik bukan berupa dari uang. Pokdarwis melakukan ini agar tidak menimbulkan konflik atas kecemburuan yang akan terjadi, apabila bantuan-bantuan untuk fasilitas pariwisata tersebut berupa uang.

Dari penjelasan informan tersebut penerapan kepercayaan antara pokdarwis dengan pihak luar yaitu Pertamina memiliki kepercayaan satu sama lain, sedangkan hubungan kepercayaan antara pokdarwis dengan masyarakat lokal belum memiliki kepercayaan terhadap pengelolaan pokdarwis. Hal ini menjadikan proses pengembangan pariwisata menjadi terhambat padahal masyarakat sebagai pelaku penggerak kegiatan yang ada di pariwisata. Tingkat kepercayaan merupakan hal yang mendasar yang harus terjalin dengan yang sehingga pengelolaan wisata dapat berjalan dengan lancar. Pelaksanaan dalam pengembangan pariwisata tidak dapat dilakukan sendiri tetap membutuhkan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk membantu (Saputra, 2021). Masyarakat lokal belum memiliki pemahaman bersama dalam keselarasan tujuan bersama dengan visi dan misi yang dimiliki oleh

pokdarwis menjadikan nilai kepercayaan satu sama lain tidak terjalin. Apabila permasalahan ini terus terjadi akan menyebabkan konflik yang semakin kompleks (Eddyono, 2021).

Nilai Kebersamaan Dalam Pengelolaan Wisata Alam

Jalinan hubungan antar pokdarwis individu satu dengan yang lainnya dalam pengelolaan memiliki nilai kebersamaan yang baik. Hal ini didasari oleh ketua pokdarwis yang memberikan arahan berupa aturan/kebijakan kepada anggotanya. Kebijakan yang diterapkan di Wisata Alam Desa Labuhan memberikan dampak positif dan keberlangsungan jalannya tujuanan berjalan lancar dengan dilakukan musyawarah internal yang diikuti oleh ketua pokdarwis dan anggota-anggota pokdarwis Wisata Alam Desa Labuhan.

> *"Harus kita jaga, artinya baik dari segi anggota internalnya bagaimana pembagian dari pendapatan. Budaya kerja pembagian hasil kas dibagi rata, dengan keamanan parkir. Namun seumpamanya dapat 200.000 atau lebih harus disisihkan untuk kas. Karena kas tidak boleh kosong untuk pemeliharaan kecil-kecilan. Dari pembagian hasil kelompok itu harus transparan, supaya berkelanjutan. Jangan sampai kas itu kosong, alhamdulillah kas itu ada walaupun hanya sedikit. Itu di pembagian pemasukan. Kalau untuk kelompok itu ya hasil dari jaga parkir itu dari tiket masuk yang terjual. Untuk pesanan makanan itu murni khusus untuk ibu-ibu (UMKM), seumpamanya dalam satu kegiatan ada 50 orang 1 hari makan 3 kali berarti ada 3 orang yang memegang itu, si A, si B, dan si C. Memang dari awal sudah ada aturan seperti itu, agar semua sama dan tidak ada kecemburuan."*

Aturan kesepakatan yang disepakati berupa keuangan dalam pembagian hasil pendapatan yang diperoleh untuk setiap anggota pokdarwis dan darimana asal pendapatan tersebut. Menyimpulkan bahwa hasil pendapatan diperoleh dari tiket parkir untuk penjaga parkir, untuk UMKM berasal dari kegiatan-kegiatan berkemah, dan pemasukan kas apabila penghasilan pendapatan yang diperoleh minimum 200.000 rupiah harus disisihkan untuk kas.

> *"Dampak dari pariwisata selain ekonomi yaitu perubahan pola pikir. Membentuk pola pikir itu sebenarnya tidak sulit, hanya saja agak lama. Karena biasanya urusan pribadi masuk ke urusan kelompok, itulah kelalaiannya. Kadang ada satu sama lainnya tidak akur, begitulah drama-drama internal."*

Semakin erat hubungan kebersamaan individu dengan individu lain yang berwadah satu organisasi/kelompok/forum memiliki peluang besar terjadinya konflik sosial. Tidak heran apabila di dalam pengelolaan pokdarwis terdapat permasalahan dalam internal. Permasalahan timbul yang terjadi di Wisata Alam Desa Labuhan pemicu urusan pribadi yang dibawa masuk kedalam urusan kelompok.

Sebelum menjalankan jejaring kerjasama dengan pihak lain (eksternal), hubungan nilai kebersamaan antara individu pokdarwis satu dengan yang lainnya (internal) harus terlebih dahulu memiliki hubungan yang baik. Pemahaman dalam tujuan pengembangan pariwisata menjadikan nilai kebersamaan semakin ada

dengan komunikasi dan pertemuan secara langsung. Diperkuat dengan aturan-aturan yang ada dalam internal bertujuan untuk menghindari ketimpangan sosial, membentuk solidaritas, dan menghindari kepentingan pribadi yang merugikan orang lain (Bagunda et al., 2019). Kesepakatan aturan yang ada di kelompok masyarakat menyangkut perilaku yang pantas dilakukan dalam interaksi sosial.

Aturan termasuk pada norma yang mana merupakan petunjuk perintah atau larangan. Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat terlepas dari norma dan pada hakikatnya manusia makhluk yang saling membutuhkan individu satu dengan individu lainya, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Ikatan kebersamaan pada kelompok agar terjalin dengan baik dengan menyamakan tujuan dan keselarasan pemahaman. Menjadikan norma menjadi hal yang mendasar dalam mengatur kelompok masyarakat demi kebersamaan.

Keadilan dalam mengambil keputusan yang diatur dan disepakati bersama. Dilakukan atas dasar kesepakatan bersama untuk menghindari ketidaksetaraan antar golongan, sehingga tidak ada kecemburuan sosial satu dengan yang lainnya (Hart, 2021). Keadilan merupakan elemen yang paling sulit untuk dicapai dalam menentukan pilihan pasti terdapat pro dan kontra dalam menghadapi pilihan yang harus diambil oleh pemimpin. Keadilan ketika diputuskan memang sulit, namun apabila keadilan ini dapat dirasakan oleh semua elemen masyarakat yang dapat memberikan banyak manfaat, salah satunya ialah terjalinnya hubungan kebersamaan. Dari penjelasan informan diatas terdapat aturan dan kesepakatan dengan menciptakan keadilan dengan dilakukan pengambilan keputusan yang tidak hanya keputusan dari ketua pengelola melainkan juga melibatkan semua anggotanya. Kondisi ini sesuai yang dikatakan oleh John Rawls pada teori keadilan yang mengatakan bahwa dalam mengambil sebuah keputusan pemimpin tidak menempatkan dirinya sebagai pemegang hak suara tertinggi pada suatu kelompok (Faiz, 2017).

Jejaring Kerjasama Dalam Pengelolaan Wisata Alam

Kelembagaan pengelolaan Wisata Alam di Desa Labuhan, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan memiliki jejaring kerjasama antara pokdarwis dengan pemerintah dan swasta. Bentuk kerjasama dengan pemerintah sendiri yaitu Dinas Pariwisata yang mana memberikan legalitas pada aktifnya wisata dan pokdarwis yang sebagai pengelola langsung di Wisata Alam Desa Labuhan. Sedangkan, bentuk kerjasama pihak swasta yaitu Pertamina yang mana memberikan fasilitas-fasilitas dibutuhkan Wisata Alam di Desa Labuhan. Fasilitas-fasilitas yang sudah pernah diberikan berupa bangunan toilet, kantor, tempat media pameran terumbu karang, dan jembatan sepanjang jalan menuju pohon Mangrove.

> *"Kartar biasanya kita libatkan saat ada kegiatan-kegiatan tertentu, ikut serta dalam kegiatan di kelompok kami."*

Ternyata tidak hanya pemerintah dan swasta yang memiliki jejaring kerjasama dengan pokdarwis di Wisata Alam Desa Labuhan, melainkan terdapat keterlibatan dengan kelompok masyarakat lokal yaitu Kartar. Kartar di Desa Labuhan kerap terlibat dalam kegiatan-kegiatan tertentu yang mana memang membutuhkan tenaga lebih untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang

diselenggarakan oleh pokdarwis. Kegiatan tersebut, seperti contoh pokdarwis mengadakan tanam mangrove 1000 bibit. Hal ini membutuhkan tenaga lebih dalam kegiatan tersebut, sehingga membutuhkan tenaga dari Kartar Desa Labuhan.

Jejaring kerjasama sangat diperlukan dalam menunjang kerjasama baik untuk kepentingan ekonomi maupun sosial. Jejaring kerjasama akan berjalan lancar dengan nilai kepercayaan dapat dipegang dalam menjalani hubungan antar pemangku kepentingan. Dalam mencapai tujuan tidak dapat hanya satu pemangku kepentingan harus menjalin hubungan kerjasama dengan pihak luar. Kemampuan kerjasama dengan pihak luar harus membangun komunikasi yang baik hal ini dilakukan bertujuan untuk mensukseskan mempermudah realisasinya tujuan yang diinginkan (Nurwati & dkk, 2020).

Simpulan dan Saran

Kesimpulan pada penelitian ini bahwa dalam peran aktor mengelola pariwisata masih terdapat kecemburuan sosial antara pokdarwis dengan masyarakat lokal. Jalinan hubungan antar pokdarwis individu satu dengan yang lainnya dalam pengelolaan memiliki nilai kebersamaan yang baik dengan diberlakukannya aturan/kebijakan yang disepakati bersama. Dan terdapat hubungan jejaring kerjasama dengan pemerintah yang diwakilkan oleh aparatur desa dan swasta yaitu Pertamina, tidak hanya itu kelompok masyarakat lokal yaitu Kartar memberikan kontribusi apabila sewaktu-waktu diperlukan.

Dengan demikian, maka dapat memberikan saran kepada pokdarwis sebagai pengelola pariwisata agar senantiasa melakukan pengelolaan dengan kelembagaan menerapkan modal sosial. Pada akhirnya, penelitian ini memberikan ide-ide penelitian selanjutnya dengan memperluas isu kelembagaan pada sektor pariwisata maupun di sektor lainnya.

Daftar Pustaka

[1] Alandera, E. (2018). *Upaya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Bukit Pangonan Dalam Membina Masyarakat Sadar Wisata Di Desa Pajaresuk, Kabupaten Pringsewu*.

[2] Amerta, I. M. S., & dkk. (2018). Sustainable tourism development. *Sustainable Tourism Development*, *5*(2), 248–254. https://doi.org/10.37040/geografie2001106030178

[3] Asmoro, B. T., & Da'awi, M. M. (2020). Revitalisasi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Sukodono, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang Dalam Pengelolaan Obyek Wisata Coban Pandawa. *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)*, *5*(1), 373–379. https://doi.org/10.21067/jpm.v5i1.3411

[4] Bagunda, N., Tulusan, F., & Laloma, A. (2019). Manajemen Pengelolaan Pariwisata Di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik*, *5*(84), 83–89.

[5] Coleman, J. S. (2021). *Modal Sosial : Seri Dasar-Dasat Teori Sosial*. Nusamedia.

[6] Daraba, D. (2017). Pengaruh Program Dana Desa Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.

Sosiohumaniora, *19* (1), 52–58. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i1.11524

[7] Dewi, W. K., & Hermawan, D. (2017). Partisipasi Civil Society Dalam Mengembangkan Pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan (Studi Pada Kelompok Sadar Wisata di Kabupaten Lampung Selatan). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, *8*(2), 175–185.

[8] Dodds, R., Ali, A., & Galaski, K. (2018). Mobilizing knowledge: determining key elements for success and pitfalls in developing community-based tourism. *Current Issues in Tourism*, *21*(13), 1547–1568. https://doi.org/10.1080/13683500.2016.1150257

[9] Eddyono, F. (2021). *Pengelolaan Destinasi Pariwisata* (1st ed.). Uwais Inspirasi Indonesia.

[10] Faiz, P. M. (2017). Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice). *SSRN Electronic Journal*. https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573

[11] Fathy, R. (2019). Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, *6*(1), 1–17. https://doi.org/10.22146/jps.v6i1.47463

[12] Gustina, R. D. (2018). *Peran Stakeholder Dalam Pengelolaan Wisata Pantai di Kelurahan Air Manis, Kecamatan Padang Selatan*. http://dx.doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2015.07.010%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.visres.2014.07.001%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.humov.2018.08.006%0Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24582474%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2018.12.007%0Ahttps:

[13] Hart, H. L. A. (2021). *Keadilan dan Moralitas : Seri Konsep Hukum*. Nusamedia.

[14] Hermawan, D., & Hutagalung, S. S. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Tata Kelola Industri Pariwisata (Studi Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Objek Wisata di Lampung Selatan). *Prosiding Seminar Nasional FISIP Universitas Lampung (SeFila)*, *3*(26), 207–217.

[15] Matthoriq, Zauhar, S., & Hermawan, R. (2021). Collaborative Governance dalam Tata Kelola Pariwisata-Desa (Studi Pariwisata-Desa "Bumiaji Agrotourism" di Kota Wisata Batu). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, *07*(01), 20–29. https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2021.007.01.3

[16] Muntasib, E. K. S. H., & dkk. (2017). *Modal Sosial Masyarakat Jawa Barat Dalam Pengembangan Ekowisata* (1st ed.). IPB Press.

[17] Nugroho. (2020). Beberapa Masalah Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata Di Indonesia. *Jurnal Pariwisata*, *7*(2), 124–131.

[18] Nurwati, D., & dkk. (2020). *ANALISIS JEJARING PELAKU PARIWISATA DI KABUPATEN BINTAN : STUDI PADA EVENT IRONMAN BINTAN*. *1*.

[19] Rhama, B. (2020). *Tata Kelola Destinasi Wisata dan Peraturan Perundangan Pariwisata* (E. Setyowati (ed.); 1st ed.). PT Kanisius.

[20] Saputra, D. (2021). Tatakelola Kolaborasi Pengembangan Kampung Wisata Berbasis Masyarakat. *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *13*(7), 85–97. https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/10741

[21] Suprapto, I. N. A., Sutiarso, M. A., & Wiratmi, N. L. D. F. (2021). Tata Kelola Destinasi Pariwisata Desa Tenganan Pegringsingan, Karangasem-Bali.

Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, *4*(1), 224–233.